



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi bertugas:

1. memberikan arahan dalam penyusunan dan penyempurnaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
2. mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
3. melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

KETIGA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas:

1. merancang rencana tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada delapan area perubahan;
2. melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019;

3. mengoptimalkan eksistensi area perubahan yang sudah maju dan meningkatkan area perubahan lain yang memerlukan perhatian khusus;
4. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
5. berkoordinasi dalam merumuskan dan menetapkan Agen Perubahan Kementerian Agama.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempunyai kewenangan:

1. mengakses data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. melakukan koordinasi dan konfirmasi intensif kepada satuan organisasi/satuan kerja tingkat pusat, instansi vertikal, dan unit pelaksana teknis yang telah memiliki Tim Reformasi Birokrasi terkait dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi disertai dengan data yang dibutuhkan; dan
3. melakukan koordinasi dan konfirmasi intensif kepada satuan organisasi/satuan kerja tingkat pusat, instansi vertikal, dan unit pelaksana teknis yang belum memiliki Tim Reformasi Birokrasi terkait dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi disertai dengan data yang dibutuhkan.

KELIMA : Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi terdiri dari:

1. Pokja Manajemen Perubahan;
2. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pokja Penguatan Kelembagaan;
4. Pokja Penguatan Tatalaksana;
5. Pokja Sistem Manajemen SDM ASN;
6. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan; dan
8. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEENAM : Pokja Reformasi Birokrasi bertugas:

1. Pokja Manajemen Perubahan:
 - a. mendorong satuan kerja Kementerian Agama baik pusat maupun daerah untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
 - c. memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Agama;

- d. mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pembentukan Agen Perubahan Kementerian Agama; dan
 - e. penyusunan rencana aksi tindak lanjut percepatan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.
2. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan bertugas:
- a. melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
 - b. menyempurnakan/mengubah/harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain; dan
 - c. melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.
3. Pokja Penguatan Kelembagaan bertugas:
- a. melakukan evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi serta kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain;
 - b. melakukan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi;
 - c. menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok;
 - d. menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan;
 - e. menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, dan restrukturisasi kelembagaan Kementerian Agama;
 - f. melakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. menyusun peta tugas dan fungsi unit kerja pada kementerian yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).
4. Pokja Penguatan Tatalaksana bertugas:
- a. melakukan pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama;
 - b. melakukan perluasan penerapan dan pengembangan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kementerian Agama;

- c. mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Kementerian Agama; dan
 - d. memberlakukan penerapan sistem kearsipan yang handal di Kementerian Agama.
5. Pokja Sistem Manajemen SDM ASN bertugas:
- a. melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. memastikan pelaksanaan penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN;
 - c. melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui *assessment* ASN;
 - d. merumuskan kebijakan sistem promosi secara terbuka pada Kementerian Agama;
 - e. merumuskan kebijakan penilaian kinerja pegawai di Kementerian Agama;
 - f. mendorong penerapan penetapan kinerja individu dan kesesuaiannya terhadap kinerja organisasi;
 - g. melakukan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dan merumuskan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja di Kementerian Agama;
 - h. melakukan pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di Kementerian Agama;
 - i. merumuskan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di Kementerian Agama;
 - j. merumuskan kebijakan pemanfaatan/pengembangan *database* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di Kementerian Agama;
 - k. merumuskan kebijakan pengendalian kualitas diklat di masing-masing K/L dan Pemda;
 - l. menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN Kementerian Agama;
 - m. melakukan pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; dan
 - n. melakukan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja
6. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertugas:
- a. melakukan penguatan akuntabilitas kinerja yang melibatkan Menteri dan pimpinan satuan kerja pada Kementerian Agama; dan
 - b. melakukan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja; dan
 - c. melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

7. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan bertugas:
 - a. melakukan pengendalian gratifikasi;
 - b. pembangunan SPIP pada unit kerja melalui peningkatan peran APIP;
 - c. penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan *whistleblowing system*;
 - e. pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; dan
 - f. melakukan pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM.
8. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertugas:
 - a. menerapkan standar pelayanan pada Kementerian Agama;
 - b. melakukan percepatan pelayanan pada unit pelayanan di Kementerian Agama dalam menciptakan budaya pelayanan prima;
 - c. berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam penilaian kepuasan terhadap pelayanan di Kementerian Agama;
 - d. melakukan deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di Kementerian Agama; dan
 - e. melakukan pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Kementerian Agama.

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi pada semua tingkatan organisasi pada Kementerian Agama, masing-masing Unit Eselon I Pusat, instansi vertikal dan unit pelaksana teknis membentuk tim yang melaksanakan seluruh Program Reformasi Birokrasi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN AGAMA

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA

A. TIM PENGARAH

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Menteri Agama	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal	Sekretaris
3.	Direktur Jenderal Pendidikan Islam	Anggota
4.	Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Anggota
5.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	Anggota
6.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen	Anggota
7.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik	Anggota
8.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu	Anggota
9.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Anggota
10.	Inspektur Jenderal	Anggota
11.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
12.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota

B. TIM PELAKSANA

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua
2.	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
3.	Kepala Biro Perencanaan	Anggota
4.	Kepala Biro Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Biro Keuangan dan BMN	Anggota

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
6.	Kepala Biro Hukum dan KLN	Anggota
7.	Kepala Biro Umum	Anggota
8.	Kepala Biro Humas, Data dan Informasi	Anggota
9.	Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama	Anggota
10.	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam	Anggota
11.	Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah	Anggota
12.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Anggota
13.	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Anggota
14.	Direktur Pendidikan Agama Islam	Anggota
15.	Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	Anggota
16.	Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Anggota
17.	Direktur Bina Haji	Anggota
18.	Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri	Anggota
19.	Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri	Anggota
20.	Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus	Anggota
21.	Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	Anggota
22.	Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	Anggota
23.	Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Anggota
24.	Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah	Anggota
25.	Direktur Penerangan Agama Islam	Anggota
26.	Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Anggota
27.	Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	Anggota
28.	Direktur Urusan Agama Kristen	Anggota
29.	Direktur Pendidikan Kristen	Anggota
30.	Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	Anggota
31.	Direktur Urusan Agama Katolik	Anggota

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
32.	Direktur Pendidikan Katolik	Anggota
33.	Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	Anggota
34.	Direktur Urusan Agama Hindu	Anggota
35.	Direktur Pendidikan Hindu	Anggota
36.	Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	Anggota
37.	Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Anggota
38.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
39.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi	Anggota
40.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	Anggota
41.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidikan dan Keagamaan	Anggota
42.	Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota

C. KELOMPOK KERJA (POKJA) REFORMASI BIROKRASI

1. Pokja Manajemen Perubahan

No	Nama/Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Pelaporan	Biro Ortala Setjen	Ketua
2.	Kabid Penyelenggaraan Diklat Pusdiklat Teknis	Balitbang dan Diklat	Anggota
3.	Kabid Program dan Evaluasi Diklat Pusdiklat Teknis	Balitbang dan Diklat	Anggota
4.	Kepala Subbag Fasilitasi Reformasi Birokrasi	Biro Ortala Setjen	Anggota
5.	Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Biro Ortala Setjen	Anggota
6.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Pendis	Anggota

No	Nama/Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
7.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen PHU	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Islam	Anggota
9.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Kristen	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Katolik	Anggota
11.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Hindu	Anggota
12.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Buddha	Anggota
13.	Kepala Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Hukum	Itjen	Anggota
14.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Balitbang dan Diklat	Anggota
15.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	BPJPH	Anggota
16.	Ridho Fitrah Hyzkia (Penyusun Laporan)	Biro Ortala Setjen	Anggota
17.	Kristanto (Penyusun naskah rapat pimpinan)	Biro Ortala Setjen	Anggota

2. Pokja Penguatan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

No	Nama/Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kabag Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Naskah Perjanjian	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
2.	Kabag Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri, dan Dokumentasi	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
3.	Kabag Advokasi dan Penyuluhan Hukum	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
4.	Kabag Kerja Sama Luar Negeri	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
5.	Kasubbag Perancangan UU dan PP	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota

No	Nama/Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
6.	Kasubbag Perancangan Perpres dan Naskah Perjanjian	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
7.	Kasubbag Perancangan Peraturan Menteri	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
8.	Kasubbag Perancangan Keputusan Menteri	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
9.	Kasubbag Advokasi Hukum I	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
10.	Kasubbag Advokasi Hukum II	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
11.	Kasubbag Kerja Sama Bilateral	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
12.	Kasubbag Kerja Sama Regional dan Multilateral	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
13.	Kasubbag Tata Usaha	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
14.	Kasubbag Hukum	Ditjen Pend. Islam	Anggota
15.	Kasubbag Hukum	Ditjen PHU	Anggota
16.	Kasubbag Hukum	Ditjen Bimas Islam	Anggota
17.	Kasubbag Hukum	Ditjen Bimas Kristen	Anggota
18.	Kasubbag Hukum	Ditjen Bimas Katolik	Anggota
19.	Kasubbag Hukum	Ditjen Bimas Hindu	Anggota
20.	Kasubbag Hukum	Ditjen Bimas Buddha	Anggota
21.	Kasubbag Hukum	Itjen	Anggota
22.	Kasubbag Hukum	Balitbang dan Diklat	Anggota
23.	Kasubbag Hukum	BPJPH	Anggota
24.	Imam Ramdhani (Analisis Produk Hukum)	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota
25.	A.H.M. Marasabessy (Analisis Produk Hukum)	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota

No	Nama/Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
26.	Abdul Latief (Analisis Produk Hukum)	Biro Hukum dan KLN Setjen	Anggota

3. Pokja Penguatan Kelembagaan

No	Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kabag Organisasi	Biro Ortala Setjen	Ketua
2.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Manajemen Organisasi	Balitbang dan Diklat	Anggota
3.	Kasubbag Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan I	Biro Ortala Setjen	Anggota
4.	Kasubbag Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan II	Biro Ortala Setjen	Anggota
5.	Kasubbag Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan III	Biro Ortala Setjen	Anggota
6.	Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana	Ditjen Pend. Islam	Anggota
7.	Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana	Ditjen PHU	Anggota
8.	Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana	Ditjen Bimas Islam	Anggota
9.	Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana	Ditjen Bimas Kristen	Anggota
10.	Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana	Ditjen Bimas Katolik	Anggota
11.	Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana	Ditjen Bimas Hindu	Anggota
12.	Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana	Ditjen Bimas Buddha	Anggota
13.	Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana	Itjen	Anggota
14.	Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana	Balitbang dan Diklat	Anggota
15.	Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana	BPJPH	Anggota
16.	Rijal Roihan (Analisis Organisasi)	Biro Ortala Setjen	Anggota
17.	Hasyim Khumaedi (Analisis Jabatan)	Biro Ortala Setjen	Anggota

No	Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
18.	Hatta Aulia (Analisis Organisasi)	Biro Ortala Setjen	Anggota

4. Pokja Penguatan Tatalaksana

No	Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kepala Bagian Tata Laksana	Biro Ortala Setjen	Ketua
2.	Kabag Teknologi dan Sistem Informasi	Biro Humas, Data, dan Informasi Setjen	Anggota
3.	Kabag Data, Sistem Informasi, dan Humas	Ditjen Pend. Islam	Anggota
4.	Kabag Perencanaan dan Humas	Ditjen PHU	Anggota
5.	Kabag Data, Sistem Informasi, dan Humas	Ditjen Bimas Islam	Anggota
6.	Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi	Ditjen Bimas Kristen	Anggota
7.	Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi	Ditjen Bimas Katolik	Anggota
8.	Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi	Ditjen Bimas Hindu	Anggota
9.	Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi	Ditjen Bimas Buddha	Anggota
10.	Kabag Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat	Itjen	Anggota
11.	Kabag Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi	Balitbang dan Diklat	Anggota
12.	Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi	BPJPH	Anggota
13.	Kasubbag Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi	Biro Humas, Data, dan Informasi Setjen	Anggota
14.	Kasubbag Tata Usaha	Biro Humas, Data, dan Informasi Setjen	Anggota
15.	Kisman Supriyatna (Penyusun Standar dan Sistem Prosedur Kerja)	Biro Ortala Setjen	Anggota
16.	Idris Rahardja (Penyusun Standar Pelayanan)	Biro Ortala Setjen	Anggota

5. Pokja Sistem Manajemen SDM ASN

No	Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kabag Pengadaan dan Pertimbangan Pegawai	Biro Kepegawaian Setjen	Ketua
2.	Kabag Asesmen dan Bina Pegawai	Biro Kepegawaian Setjen	Anggota
3.	Kabag Data, Informasi dan Naskah Kepegawaian	Biro Kepegawaian Setjen	Anggota
4.	Kabag Organisasi	Biro Ortala Setjen	Anggota
5.	Kasubbag Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan I	Biro Ortala Setjen	Anggota
6.	Kasubbag Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan II	Biro Ortala Setjen	Anggota
7.	Kasubbag Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan II	Biro Ortala Setjen	Anggota
8.	Kasubbag Sistem dan Layanan Kepegawaian	Biro Kepegawaian Setjen	Anggota
9.	Kasubbag Pengadaan Pegawai	Biro Kepegawaian Setjen	Anggota
9.	Kasubbag Pertimbangan Kepegawaian	Biro Kepegawaian Setjen	Anggota
10.	Kasubbag Asesmen Pegawai	Biro Kepegawaian Setjen	Anggota
11.	Kasubbag Bina Karir Pegawai	Biro Kepegawaian Setjen	Anggota
13.	Kasubbag Tata Usaha	Biro Kepegawaian Setjen	Anggota
14.	Kasubbag Kepegawaian	Ditjen Pend. Islam	Anggota
15.	Kasubbag Kepegawaian	Ditjen PHU	Anggota
16.	Kasubbag Kepegawaian	Ditjen Bimas Islam	Anggota
17.	Kasubbag Kepegawaian	Ditjen Bimas Kristen	Anggota
18.	Kasubbag Kepegawaian	Ditjen Bimas Katolik	Anggota
19.	Kasubbag Kepegawaian	Ditjen Bimas Hindu	Anggota
20.	Kasubbag Kepegawaian	Ditjen Bimas Buddha	Anggota
21.	Kasubbag Kepegawaian	Itjen	Anggota
22.	Kasubbag Kepegawaian	Balitbang dan Diklat	Anggota
23.	Kasubbag Kepegawaian	BPJPH	Anggota

No	Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
24.	Hilal Sirrika Kholid (Arsiparis Muda)	Biro Kepegawaian Setjen	Anggota
25.	Aulia Muttaqin (Analisis Kompetensi)	Biro Kepegawaian Setjen	Anggota

6. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja

No	Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kabag Evaluasi Kinerja Organisasi dan Fasilitas Penyelesaian Hasil Pengawasan	Biro Ortala Setjen	Ketua
2.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Pendis	Anggota
3.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen PHU	Anggota
4.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Islam	Anggota
5.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Kristen	Anggota
6.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Katolik	Anggota
7.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Hindu	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Buddha	Anggota
9.	Kepala Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Hukum	Itjen	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Balitbang dan Diklat	Anggota
11.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	BPJPH	Anggota
12.	Kabag Data Perencanaan dan Kerjasama Dalam Negeri	Biro Perencanaan Setjen	Anggota
13.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama, Kerukunan, dan Aliran Keagamaan	Balitbang dan Diklat	Anggota
14.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Haji, Umrah, dan Produk Halal	Balitbang dan Diklat	Anggota

No	Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
15.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Pendidikan RA dan Madrasah	Balitbang dan Diklat	Anggota
16.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Pendidikan Tinggi Keagamaan	Balitbang dan Diklat	Anggota
17.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan	Balitbang dan Diklat	Anggota
18.	Kasubbag Pengolahan Data Perencanaan	Biro Perencanaan Setjen	Anggota
19.	Kasubbag Evaluasi Kinerja Organisasi	Biro Ortala Setjen	Anggota
20.	Listyoati (Pengadministrasi)	Biro Ortala Setjen	Anggota
21.	Farid Ristafana (Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja)	Biro Ortala Setjen	Anggota

7. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan

No	Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kabag PHP, SIP, dan Dumas	Itjen	Ketua
2.	Kepala Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Hukum	Itjen	Anggota
3.	Kabag Evaluasi Kinerja Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan	Biro Ortala Setjen	Anggota
4.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Pendis	Anggota
5.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen PHU	Anggota
6.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Islam	Anggota
7.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Kristen	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Katolik	Anggota
9.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Hindu	Anggota

No	Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
10.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Ditjen Bimas Buddha	Anggota
11.	Kepala Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Hukum	Itjen	Anggota
12.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Balitbang dan Diklat	Anggota
13.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	BPJPH	Anggota
14.	Kasubbag PHP, Dumas dan SIP	Itjen	Anggota
15.	Kasubbag TLHP Internal	Biro Ortala Setjen	Anggota
16.	Kasubbag TLHP Eksternal	Biro Ortala Setjen	Anggota
17.	Kasubbag Ortala	Itjen	Anggota
18.	Dian Andriady (Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja)	Itjen	Anggota
19.	Arief Aditya Arman (Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit)	Itjen	Anggota
20.	M. Reza (Pengadministrasi)	Biro Ortala Setjen	Anggota
21.	Abdul Kholil (Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja)	Biro Ortala Setjen	Anggota

8. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Kabag Tata Laksana	Biro Ortala Setjen	Ketua
2.	Kabag PHP, SIP, dan Dumas	Itjen	Anggota
3.	Kasubbag Pelayanan Publik	Biro Ortala Setjen	Anggota
4.	Kasubbag Dumas, dan SIP	Itjen	Anggota
5.	Kasubbag Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan Eksternal	Biro Ortala Setjen	Anggota
6.	Kasubbag Ortala	Ditjen Pendis	Anggota
7.	Kasubbag Ortala	Ditjen PHU	Anggota
8.	Kasubbag Ortala	Ditjen Bimas Islam	Anggota
9.	Kasubbag Ortala	Ditjen Bimas Kristen	Anggota

No	Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Pokja
10.	Kasubbag Ortala	Ditjen Bimas Katolik	Anggota
11.	Kasubbag Ortala	Ditjen Bimas Hindu	Anggota
12.	Kasubbag Ortala	Ditjen Bimas Buddha	Anggota
13.	Kasubbag Ortala	Itjen	Anggota
14.	Kasubbag Ortala	Balitbang dan Diklat	Anggota
15.	Kasubbag Ortala	BPJPH	Anggota
16.	Kabid Pentashihan	Balitbang dan Diklat	Anggota
17.	Kabid Museum Bayt	Balitbang dan Diklat	Anggota
18.	Kabid Lektur Keagamaan	Balitbang dan Diklat	Anggota
19.	Shelvy Nabashah (Penyusun Standar dan Sistem Prosedur Kerja)	Biro Ortala Setjen	Anggota
20.	Puji Astuti (Penyusun Standar Pelayanan)	Biro Ortala Setjen	Anggota

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN